



EVALUASI PEMEKARAN DAERAH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Ropiko Duri^{1*}, Mutia Rahmah²

¹Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Demang Lebar Daun No.2610, Bukit Baru, Palembang, Indonesia

²Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Ampera Raya, Jakarta Selatan, Indonesia

*Corresponding Author

Email: rapiko97@gmail.com

Abstract

Evaluation of regional expansion of Empat Lawang regency is expected to focus more on the results of policies that have been carried out after regional expansion and analyze how far the success rate of efforts to realize welfare for the community during the 10 years after the regional expansion. The welfare in this case is a condition that shows a better state than the condition before the policy. This research uses descriptive qualitative research design, data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The selection of informants is based on purposive sampling techniques and snowball sampling. The study used three main indicators in looking at welfare development consisting of education, health services, and the development of people's income levels. The study used evaluation criteria from William N Dunn. The results showed that the Policy of regional expansion of Empat Lawang Regency has not been able to fully improve the welfare of the community and still shows a slow development trend, as seen from: 1) the effectiveness criteria are large numbers, the number of people dropping out of school, limited health personnel, and a decline in economic growth last year and a decline in GRDP in the past year; 2) the criteria for adequacy have not been able to show the level of effectiveness in meeting community needs; 3) equal distribution criteria in the form of uneven access to education; 4) responsiveness criteria in the form of a lack of government response in repairing roads for population mobility; 5) accuracy criteria in the form of inaccurate revocation of the status of disadvantaged areas of Empat Lawang Regency.

Keywords: policy, welfare, regional expansion

Abstrak

Evaluasi Pemekaran daerah Kabupaten Empat Lawang diharapkan dapat lebih fokus terhadap hasil kebijakan yang telah dilakukan setelah adanya pemekaran daerah dan menganalisis seberapa jauh tingkat keberhasilan dari upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat selama 10 tahun pasca pemekaran. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kondisi yang memperlihatkan keadaan yang lebih baik dari kondisi sebelum adanya kebijakan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Penelitian menggunakan tiga indikator utama dalam melihat perkembangan kesejahteraan yang terdiri dari pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan kriteria evaluasi dari William N Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pemekaran Daerah Kabupaten Empat Lawang belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan masih menunjukkan *trend* pembangunan yang lambat, sebagaimana tampak dari: 1) kriteria efektivitas berupa masih banyaknya penduduk yang putus sekolah, terbatasnya tenaga kesehatan, serta menurunnya laju pertumbuhan ekonomi 3 tahun terakhir dan menurunnya PDRB di tahun terakhir; 2) kriteria kecukupan belum mampu menunjukkan tingkat efektivitas dapat memuaskan kebutuhan masyarakat; 3) kriteria pemerataan berupa belum terjadinya pemerataan pada akses pendidikan; 4) kriteria responsivitas berupa masih kurangnya respon pemerintah dalam perbaikan jalan untuk mobilitas penduduk; 5) kriteria ketepatan berupa belum tepatnya pencabutan status daerah tertinggal Kabupaten Empat Lawang.

Kata Kunci: Kebijakan, Kesejahteraan, Pemekaran Daerah

I. PENDAHULUAN

Pemerintahan lahir untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Naisaban & Rahmah, 2020, p. 148; Wibawa, 2019, p. 220). Dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut disetiap negara akan menemui dua hal yang berbeda corak yaitu bentuk *state efficiency* yang bercorak sentralisasi dan *local democracy* yang bercorak desentralisasi (Waskitawati, 2018). Desentralisasi dipahami untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan dan mengaktualisasikan representasi lokal, sehingga adanya keinginan untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat (Hamdi, 2002, p. 66). Melihat perkembangan pelaksanaan desentralisasi, jumlah Daerah Otonomi Baru (DOB) sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sampai tahun 2009 adalah sebanyak 205 DOB yang terdiri dari 7 provinsi 164 kabupaten dan 34 kota. DOB yang terbentuk dari tahun 2010 sampai 2014 sebanyak 18 DOB yang terdiri dari 1 provinsi, 17 kabupaten sehingga total DOB tahun 1999-2014 sebanyak 223 dan dikalkulasikan dengan DOB pra reformasi dengan 249 kabupaten, 65 kota dan 26 provinsi total menjadi sebanyak 542 DOB. Dengan data sebagai berikut:

Tabel 1.
Perkembangan Penambahan Jumlah Daerah Otonom di Indonesia

TAHUN	PROVINSI	KABUPATEN	KOTA	TOTAL
Sebelum Reformasi	26	234	59	319
1999-2009	7	164	34	205
2010-2012	1	14	0	15
2013-2014	0	3	-	3
TOTAL	34	415	93	542

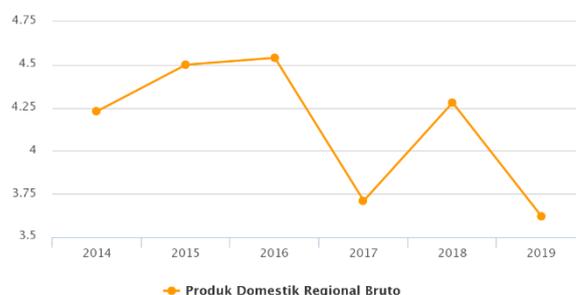
Sumber: Otta.kemendagri.go.id (2019)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa dalam jangka waktu 15 tahun terbentuk 223 daerah otonom. Hal ini menunjukkan produktifitas pembentukan daerah otonom sangat besar, namun kondisi tersebut ditata kembali oleh pemerintah melalui moratorium pemekaran daerah yang sebagian besar bermasalah melakukan evaluasi, supervisi, dan pembenahan yang diperlukan (Akbar, 2017; Ratnawati, Afadlal, & Nyimas, 2009).

Dilihat dari alokasi dana, sebanyak 514 kabupaten/kota mengalokasikan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat sebanyak 80% untuk belanja pegawai, dari jumlah tersebut, 70% dialokasikan untuk gaji pegawai. Seharusnya dana

yang dialokasikan untuk belanja dan gaji pegawai hanya sebesar 45% (Kuwado, 2018). Hal ini mengakibatkan dana transfer dari pemerintah pusat habis untuk belanja pegawai, selain itu dana bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan juga tidak dapat tercukupi.

Kabupaten Empat Lawang merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Lahat. Bersama dengan 56 kabupaten/kota lainnya termasuk sebagai daerah yang dievaluasi oleh Kemendagri pada periode pembentukan tahun 2007 sampai 2009. Kabupaten Empat Lawang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten. Selama 10 (sepuluh) tahun pemekaran ditinjau dari aspek penilaian kesejahteraan masyarakat dibidang pendapatan. Terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan yang dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan data sebagai berikut:

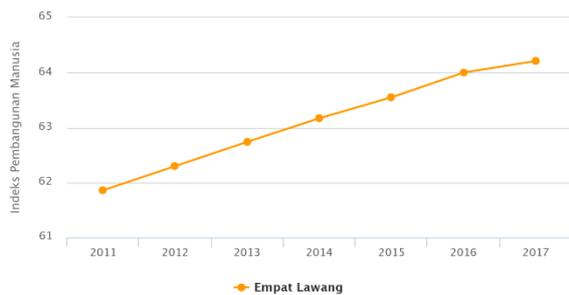


Gambar 1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Empat Lawang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2019 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang (BPS, 2020)

Berdasarkan gambar 1 di atas, PDRB Kabupaten Empat Lawang tahun 2014 sebesar 4,23%, mengalami kenaikan tahun 2015 sebesar 4,5%, mengalami kenaikan kembali sebesar 4,54%, namun mengalami penurunan yang pesat tahun 2017 sebesar 3,71%, meningkat kembali sebesar 4,28% tahun 2018 dan kembali turun menjadi 3,62% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Empat Lawang mengalami penurunan pada tahun terakhir.

Dilihat dari kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengacu pada standar dari *United Nations Development Programme* (UNDP) dengan menggunakan tiga dimensi utama/pokok yaitu dimensi angka harapan hidup, dimensi pengetahuan atau pendidikan serta dimensi hidup layak dengan kategori yang menunjukkan tingkatan IPM Suatu wilayah yang dikategorikan sebagai berikut yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi, serta IPM 60-79 kategori sedang (Portal Informasi Indonesia, 2019).



Gambar 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Empat Lawang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang (BPS, 2020)

Berdasarkan gambar 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) Kabupaten Empat Lawang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011, IPM Kabupaten Empat Lawang mencapai 61,68 kenaikan terus terjadi hingga tahun 2017 sebesar 64,21. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kemajuan dalam konteks pembangunan manusia. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun IPM Kabupaten Empat Lawang masih masuk dalam kategori sedang.

Hasil penelitian sebelumnya terkait pemekaran daerah pernah dilakukan oleh Bappenas dengan judul *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007* dengan tujuan meliputi: (1) melakukan evaluasi terhadap perkembangan pemekaran daerah yang dilihat dari perspektif ekonomi, keuangan, pelayanan publik dan pegawai pemerintah, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat; (2) Melakukan identifikasi masalah yang terjadi pada saat pemekaran daerah khususnya dilihat dari perspektif ekonomi, keuangan, pelayanan publik dan pegawai pemerintah; dan (3) Merumuskan rekomendasi kebijakan pemekaran daerah. Metode *treatment-control* dan pemilihan sampel secara *purposive* menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk melakukan evaluasi kinerja dan melihat kondisi daerah baru dalam penelitian ini menggunakan *Treatment-control*. Daerah yang menjadi hasil pemekaran mendapatkan *treatment* atau perlakuan kebijakan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa daerah-daerah hasil pemekaran yang menjadi cakupan wilayah studi, pada umumnya tidak berada dalam kondisi awal yang dianggap lebih baik apabila dikomparasikan dengan daerah induk. Lima tahun berjalan setelah pemekaran, kondisi daerah yang sudah dimekarkan masih dibawah daerah induk. Dilihat dari tingkat kemiskinan yang dapat dikatakan bahwa ada penurunan, tetapi malah hanya terfokus pada wilayah yang menjadi daerah otonomi baru. Dari perspektif pelayanan publik, masih dibawah daerah induk, hal ini juga terjadi pada aspek kinerja ekonomi, keuangan dan pegawai pemerintah. Daerah otonomi baru masih tertinggal apabila dibandingkan dengan kondisi daerah induk (Bappenas, 2007).

Penelitian lainnya terkait evaluasi pemekaran Kabupaten Lampung Barat yang dilihat dari aspek persepsi, pengetahuan, dan dampak pemekaran bagi

masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi pemekaran dilihat dari perspektif persepsi, pengetahuan, dan dampak pemekaran bagi masyarakat. Deskriptif dengan pendekatan kualitatif menjadi jenis penelitian yang digunakan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagian besar masyarakat menyetujui adanya pemekaran daerah Kabupaten Lampung Barat. Persetujuan ini dikarenakan adanya anggapan masyarakat bahwa pemekaran ini tidak terlalu berpengaruh bagi mereka. Hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat akan pemekaran daerah masih kurang. Namun hal ini menimbulkan dampak positif yang mana dinas lebih mudah melaksanakan tugas dan fungsinya karena permasalahan yang seharusnya ditangani oleh pihak dinas dari masalah Pesisir Barat dapat berkurang. Adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya pengangguran, hilangnya kebudayaan dan sektor pariwisata menjadi dampak negatif dari adanya pemekaran. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemekaran daerah, serta sikap masyarakat yang pasif bahkan sebagian masyarakat kurang tertarik dengan adanya pemekaran daerah (Hidayati, 2017).

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Husin dengan judul *Evaluasi kebijakan pemekaran daerah di Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemekaran daerah di Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran daerah di Kabupaten Banggai Laut dinilai dalam kategori sedang. Dilihat dari situasi dan kondisi di lapangan, masih terdapat berbagai kelemahan dalam pemekaran Daerah. Adanya masalah dimana terjadi ketidaksesuaian antara situasi dan kondisi di lapangan dengan hasil evaluasi oleh evaluator, hal ini disebabkan adanya kegiatan evaluasi yang kurang objektif dan independen. Penelitian ini menunjukkan bahwa inti dari kebijakan pemekaran daerah yang mencakup kriteria dan prosedur pemekaran daerah dianggap masih cukup bijaksana. Selain itu, proses pemekaran daerah di Kabupaten Banggai Laut cenderung dipaksakan (Husin, 2019).

Hakim, Hamidi, dan Tampubolon juga pernah melakukan penelitian tentang Analisis dampak pemekaran daerah dilihat dari percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik (*Studi pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemekaran dilihat dari percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009-2014 atau setelah berlakunya kebijakan pemekaran. Selain itu, untuk menganalisis kondisi rentang kendali (*span of control*) dari kedua aspek tersebut. Metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan Uji Independent *Sample T-Test* menjadi metode dalam penelitian ini. Dokumentasi atau data sekunder *time series* tahun 2009-2013 merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja perekonomian daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

setelah pemekaran, pengaruh pemekaran belum menunjukkan hasil yang positif dari percepatan pertumbuhan ekonomi sedangkan kinerja pelayanan publik ada. Perbedaan yang signifikan setelah pemekaran, dampak pemekaran menunjukkan hasil yang positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik daerah. Hal tersebut diduga terjadi karena luas areal semakin mengecil sehingga rentang kendali semakin baik (Hakim, Hamidi, & Tampubolon, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, perbedaan fokus, tujuan, metode, dan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, pertanyaan penelitian tulisan ini adalah bagaimana evaluasi dari kebijakan yang telah dibuat dalam penyelenggaraan pemerintahan setelah pemekaran Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi dari kebijakan yang telah dilakukan setelah adanya pemekaran daerah dalam aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari penelitian sebelumnya, tidak ada yang memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari kebijakan pemekaran daerah dengan melihat evaluasi kebijakan dari William N Dunn dari kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan (Dunn, 2018, p. 333).

Pertama, kriteria efektivitas berkenaan bagaimana alternatif mencapai hasil yang diharapkan. Efektivitas dalam hal ini berhubungan erat dengan rasionalitas teknis. Kedua, kriteria efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas. Ketiga, kriteria kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang akan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria ini memfokuskan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dengan hasil yang diharapkan. Keempat, kriteria pemerataan berkenaan dengan bagaimana biaya dan manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok tertentu. Kelima, kriteria responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Secara lebih aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari kebijakan yang dibuat. Keenam, kriteria ketepatan berkenaan dengan rasionalitas substantif atau apakah hasil yang diinginkan berguna atau bernilai.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam prosesnya, peneliti hanya membatasi penelitian dengan menggunakan teori evaluasi menurut Dunn yang dilihat dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Informan dalam tulisan ini menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling* meliputi Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Anggota DPRD, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Subbagian

Tata Kelola, Kepala Subbagian Otonomi Daerah, Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan, serta tokoh masyarakat. Selain itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggunakan triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data. Mengingat luasnya lingkup penelitian terkait evaluasi kebijakan pemekaran wilayah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka penelitian ini berfokus pada Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan membahas dan menjawab rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana evaluasi dari kebijakan yang telah dibuat dalam penyelenggaraan pemerintahan setelah pemekaran Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan konsep evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N Dunn yang memuat 6 (enam) kriteria evaluasi dari kebijakan yang dijalankan serta indikator utama meliputi pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat. Namun sebelum menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti akan menguraikan tentang kebijakan apa yang telah dibuat selama pemekaran daerah di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

Tujuan utama dari pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan pelayanan yang lebih baik. Kabupaten Empat Lawang yang resmi terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 menjadi landasan hukum sebagai salah satu daerah yang memiliki hak sebagai daerah otonom yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lahat.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti melihat bagaimana peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan diartikan sebagai peningkatan dibidang kesehatan, pendidikan dan naiknya pendapatan masyarakat sesuai *HDI/IPM*. *IPM* dibentuk oleh dimensi dasar meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak (“Badan Pusat Statistik,” n.d.).

Tabel 2.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Empat Lawang

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	Pengeluaran perkapita disesuaikan GDP (Rupiah)	IPM
2012	63,95	11,51	6,97	8.393	62,30
2013	63,97	11,65	7,02	8.856	62,74
2014	63,98	11,84	7,24	8.656	63,17
2015	64,18	11,85	7,29	8.727	63,55
2016	64,25	12,02	7,30	8.944	64,00
2017	64,32	12,03	7,37	9.010	64,21

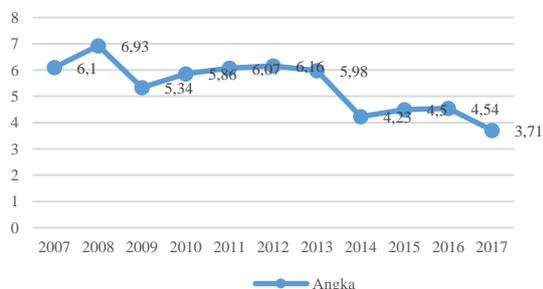
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS, 2020)

Berdasarkan tabel 2 di atas, IPM Kabupaten Empat Lawang mengalami kenaikan dari tahun 2012-2017. Capaian ini dibentuk dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Guna menghitung dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator angka harapan hidup saat lahir. Rata-rata lama sekolah (MYS) dan harapan lama sekolah (EYS) merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita. Dalam 6 tahun sejak tahun 2012-2017, IPM sudah meningkat sebesar 1,91 poin. Namun kenaikan ini apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Empat Lawang menempati posisi keempat terendah. Selain itu, IPM Kabupaten Empat Lawang masih berada di bawah IPM Sumatera Selatan yaitu 67,46 pada tahun 2017 (BPS, 2018).

1. Efektivitas

Tujuan pemekaran daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang memuat indikator kesejahteraan meliputi kemajuan dibidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Pengukuran peningkatan pendapatan masyarakat yang secara makro dapat dilihat dari peningkatan jumlah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan melihat semua sektor yang ada kemudian dapat diketahui sektor mana saja yang unggul dan tidak unggul, dimana sektor yang lebih unggul dapat disimpulkan sebagai sektor utama yang dapat mendorong Pendapatan Asli Daerah sekaligus pendapatan masyarakat.

PDRB yang memiliki fungsi untuk dapat memberikan informasi mengenai kemampuan sumber daya ekonomi disuatu wilayah, PDRB yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi berisikan informasi keseluruhan terkait dengan pertumbuhan ekonomi pertahun, pendapatan masyarakat dan pendapatan makro daerah. Berikut perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Empat Lawang tahun 2007-2017.



Gambar 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2007-2017

Sumber: BPS Kabupaten Empat Lawang (BPS, 2018)

Dilihat dari gambar 3 di atas, terlihat bahwa penurunan drastis dari awal pemekaran daerah yaitu sebesar 6,1% menjadi 3,71% atau hampir turun 2 kali lipat dari kondisi pertumbuhan ekonomi di awal tahun pemekaran. Pertama kali terjadinya penurunan angka persentase tersebut adalah pada tahun 2009 sempat mengalami perbaikan sampai dengan tahun 2012 kemudian menurun kembali pada tahun 2014 dan 2017. Kondisi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Empat Lawang yang menunjukkan *trend* negatif menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat sedang mengalami permasalahan kondisi yang dua kali lipat berbanding terbalik dengan kondisi awal dalam 10 tahun menunjukkan lemahnya laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan bahwa kuatnya peran tiap-tiap sektor dalam menumbuhkan nilai tambah. Apabila struktur ekonomi disajikan dari waktu ke waktu maka terdapat perubahan struktur perekonomian yang terjadi. Selain itu, adanya pergeseran struktur ekonomi ini sering digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan adanya suatu proses pembangunan. Selama periode 2015–2017, struktur ekonomi Kabupaten Empat Lawang masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Hanya saja kontribusinya semakin menurun. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2016, kontribusi lapangan usaha ini dalam perekonomian Kabupaten Empat Lawang mencapai 36,77% kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 34,52%. Lapangan usaha lainnya yang juga memberikan sumbangan yang besar, yakni lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebesar 19,20%, serta lapangan usaha konstruksi sebesar 11,69%. Baik PDRB per-kapita maupun Pendapatan Regional per-kapita digunakan sebagai ukuran pemerataan ekonomi. Jika PDRB per-kapita menjelaskan tentang rata-rata produktivitas setiap penduduk maka pendapatan regional lebih menjelaskan tentang potensial pendapatan secara orang perorang yang dapat digunakan untuk konsumsinya. Ukuran produktivitas menunjukkan seberapa besar sumbangan tiap individu per kapita terhadap pembentukan PDRB yang pada gilirannya akan terdistribusi menjadi sumber pendapatan masyarakat. Pada tahun 2017, PDRB per kapita Kabupaten Empat Lawang atas dasar harga berlaku baik dengan migas maupun tanpa migas mengalami peningkatan. Nilainya naik dari 17,33 juta rupiah tahun 2016 menjadi 18,17 juta rupiah tahun 2017. PDRB per kapita atas dasar harga konstan pun meningkat sekitar 0,31% dari tahun sebelumnya, yakni dari sebesar 12,83 juta rupiah tahun 2016 menjadi 10,34 juta rupiah tahun 2017. Berikut Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Empat Lawang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha tahun 2015-2017.

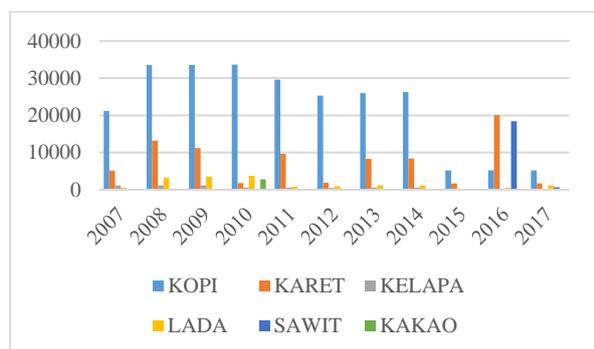
Tabel 3.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017

NO	Lapangan Usaha/Industri	2015(%)	2016(%)	2017(%)
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	4,13	2,05	1,16
2	Pertambangan dan penggalian	5,77	5,60	8,29
3	Industri Pengolahan	7,72	8,03	8,19
4	Pengadaan Listrik dan gas	1,47	8,49	4,82
5	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	4,15	0,94	2,03
6	Konstruksi	0,08	5,49	6,24
7	Perdagangan	3,47	8,20	7,17
8	Transportasi	9,29	5,93	8,15
9	Penyediaan akomodasi makan, minum	9,73	9,79	7,83
10	Informasi dan komunikasi	8,38	6,63	8,13
11	Jasa keuangan dan asuransi	3,87	5,69	8,13
12	Real estate	6,65	7,91	2,44
13	Jasa perusahaan	4,01	5,90	6,87
14	Administrasi pemerintahan	8,67	2,90	2,80
16	Jasa pendidikan	5,18	2,39	0,14
17	Jasa kesehatan	6,40	1,19	2,80
18	Jasa lainnya	3,96	2,37	4,31
Jumlah		4,50	4,54	3,71

Sumber: BPS Kabupaten Empat Lawang (BPS, 2018)

Dilihat dari tabel 3 di atas, lapangan usaha atau industri yang selama tiga tahun berturut turut mengalami penurunan adalah sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pendidikan, sedangkan lapangan usaha lainnya masih berfluktuasi.



Gambar 4. Produksi Hasil Tanaman Perkebunan di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2007-2017

Sumber: BPS Kabupaten Empat Lawang (BPS, 2018)

Perkembangan produksi kopi sebagai jenis tumbuhan utama yang memiliki hasil produksi terbesar terus mengalami penurunan yang sangat signifikan. Bahkan empat kali lipat berkurang dari awal masa

menjadi daerah otonom kondisi produksi terburuk terjadi pada tahun 2015 hingga tahun 2017. Sementara itu jenis tumbuhan yang tumbuh adalah hasil produksi karet dan sawit.

Dilihat dari kondisi pendidikan, pemanfaatan fasilitas pendidikan dapat ditunjukkan dari persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS). Pada tahun 2017, APS anak usia 7-12 tahun atau duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) mencapai 99,5%, usia 13-15 tahun atau duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 98,64% dan usia 16-18 tahun atau duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 76,03%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang Pendidikan, persentase penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan semakin menurun. Artinya masih banyak penduduk yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (BPS, 2018).

Dilihat dari bidang Kesehatan, Kabupaten Empat Lawang memiliki satu unit Rumah Sakit, 10 puskesmas, 178 posyandu, 119 poskesdes. Fasilitas ini masih kurang apabila dilihat dari jumlah kelahiran yang ditolong oleh tenaga non kesehatan masih meningkat, yaitu dari 118 kelahiran pada tahun 2016 menjadi 242 kelahiran pada tahun 2017. Selain itu, ISPA sebanyak 3.092 kasus, hipertensi sebanyak 2.338 kasus, dan Gastritis sebanyak 2.254 kasus menjadi tiga jenis penyakit dengan kasus tertinggi di Kabupaten Empat Lawang. Hal lain juga dilihat dari salah satu indikator dari meningkatnya tingkat kesehatan bayi dan balita adalah rendahnya bayi yang menderita Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan gizi buruk. Pada tahun 2017, dari 4.722 bayi lahir, terdapat 43 bayi menderita BBLR dan 10 bayi mengalami gizi buruk (BPS, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, kriteria efektivitas yang dilihat dari 3 indikator mencakup pendidikan, kesehatan dan pendapatan masih dikatakan belum efektif. Hal ini terbukti dari masih banyaknya penduduk yang tidak dapat melanjutkan sekolah, masih meningkatnya penduduk yang tidak dapat ditolong oleh tenaga kesehatan, serta menurunnya laju pertumbuhan ekonomi 3 tahun terakhir dan menurunnya PDRB di tahun terakhir.

2. Efisiensi

Untuk melaksanakan upaya pembangunan dibutuhkan dana yang menunjang proses penyelenggaraan pemerintahan. Biaya pembangunan suatu daerah diperoleh dari dua sumber yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keuangan Kabupaten Empat Lawang sejak menjadi kabupaten baru sangat bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat untuk menjalankan proses pembangunan. Hal ini terlihat dengan perbandingan besaran dana perimbangan yang diterima dengan pendapatan asli daerah yang dimiliki sendiri dari mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 dengan semakin besarnya jumlah anggaran dana perimbangan yang diterima juga menunjukkan angka yang besar pula

sementara besaran PAD tidak lebih dari 20% dari total alokasi anggaran keuangan daerah.

Tabel 4.

Jumlah APBD yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	APBD	DANA PERIMBANGAN	PAD
2007	227 m	220 m	531 juta
2008	239 m	217,6 m	2,5 m
2009	344,10 m	319,55 m	9 m
2010	534,81 m	382,3 m	11,32 m
2011	539,81 m	440,42 m	18,48 m
2012	593,10 m	506,67 m	21,48 m
2013	664,27 m	555,13 m	24,23 m
2014	781,49 m	643,66 m	32,66 m
2015	728,38 m	554,05 m	27,12 m
2016	801,72 m	638,52 m	22,35 m
2017	904,23 m	681,60 m	68,80 m

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang (BPKAD, 2018)

Dilihat dari tabel 4 di atas, Kabupaten Empat Lawang, tahun 2017 jumlah APBD sebesar 904,23 miliar rupiah yang sebagian besar bersumber dari dana perimbangan mencapai 75,37% dari jumlah APBD atau sebesar 681,60 miliar rupiah sedangkan 7,6% lainnya bersumber dari PAD atau sebesar 68,80 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang dengan Pemerintah Pusat melalui APBN. Selain itu, persentase capaian PAD tahun 2017 adalah sebesar 88,03% dari target sebesar 100% (LKIP, 2018).

Dilihat dari belanja daerah, Kabupaten Empat Lawang memiliki pos anggaran belanja pada tahun 2017 adalah sebesar 891,23 miliar rupiah dengan komposisi 51,81% diantaranya dihabiskan untuk kegiatan belanja langsung, sementara sebesar 48,18% atau sebesar 461,77 miliar rupiah lainnya digunakan untuk kegiatan belanja tidak langsung.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kriteria efisiensi masih masuk dalam kategori cukup efisien apabila dilihat dari standar efisiensi kinerja pemerintah.

3. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, preferensi nilai atau kesempatan dengan asumsi bahwa apapun yang mengalami peningkatan kualitas maka hasil atau tujuan yang diharapkan berhasil.

Kabupaten Empat Lawang tahun 2017 memiliki jumlah Sekolah 192 SD/ sederajat untuk menampung 30.057 siswa dan 93 guru, 42 SMP/ sederajat untuk menampung 12.908 siswa dan 934 guru, serta 17 SMA/ sederajat untuk menampung 6.811 siswa dan 514 guru. Dilihat dari rasio jumlah siswa terhadap guru, untuk SD sebesar 323:1, SMP sebesar 13:1, untuk SMA sebesar 13:1. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya jumlah guru pada tingkat SD/ sederajat.

Dari kriteria kecukupan terlihat bahwa pemekaran daerah belum mampu menunjukkan tingkat efektivitas dapat memuaskan kebutuhan masyarakat.

4. Pemerataan

Pemerataan (*Equity*) erat kaitannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Dari data rasio siswa terhadap guru yang telah ditampilkan pada kriteria kecukupan, meskipun rasio siswa terhadap guru pada tingkat SMP dan SMP yaitu 13:1, namun dilihat dari pemerataan dan persebaran sekolah, murid, maupun guru masih belum merata. Hal ini ditunjukkan dengan data berikut.

Tabel 5.

Sebaran Sekolah berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru
1	Muara Pinang	31	7.420	569
2	Lintang Kanan	26	4.986	378
3	Pendopo	37	7.208	522
4	Pendopo Barat	17	3.596	250
5	Pasemah Air Keruh	22	4.500	261
6	Ulu Musi	26	3.873	283
7	Sikap Dalam	16	2.825	214
8	Talang Padang	15	2.488	210
9	Tebing Tinggi	47	10.813	810
10	Saling	14	2.223	155
Jumlah		251	49.932	3.652

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka (BPS, 2018)

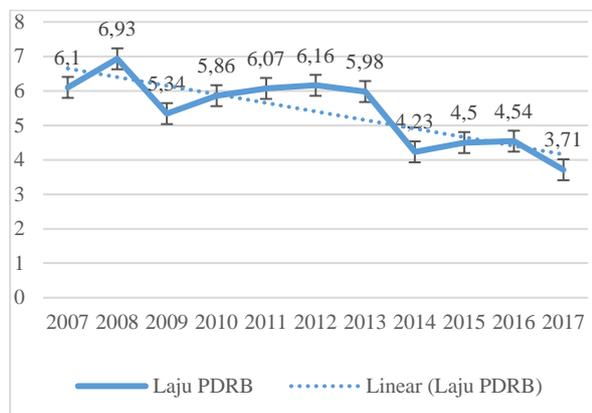
Berdasarkan tabel di atas, dilihat dari sebaran sekolah, siswa, dan guru, masih belum merata, hal ini ditunjukkan dari banyaknya sekolah, siswa, dan guru yang terpusat pada ibukota Kabupaten Empat Lawang yaitu Kecamatan Tebing Tinggi dan Kota Ekonomi di Kecamatan Pendopo.

Dari Sektor perekonomian, PDRB dilihat dari angka kemiskinan. Angka kemiskinan memberi gambaran mengenai tingkat pendapatan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin.



Gambar 5. Penduduk Miskin di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2017
Sumber: BPS Kabupaten Empat Lawang (BPS, 2018)

Berkurangnya jumlah masyarakat miskin menunjukkan adanya perbaikan pada sektor pemerataan pembangunan, semakin sedikit orang miskin berarti dapat diartikan bahwa pendapatan masyarakat meningkat namun pada data statistik justru menunjukkan sebaliknya, laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun menunjukkan *trend* negatif, artinya pertumbuhan ekonomi lambat. Hal ini akan menambah volume jumlah penduduk miskin yang ada sebelumnya.



Gambar 6. Perbandingan Laju pertumbuhan Ekonomi
Sumber: BPS Kabupaten Empat Lawang (BPS, 2018)

Penurunan jumlah penduduk miskin dan penurunan jumlah PDRB pertahun yang ada menunjukkan adanya permasalahan pendapatan perekonomian masyarakat yang cenderung menurun dan sekaligus menambah indeks kedalaman kemiskinan.

Selain itu, jalan yang merupakan prasarana untuk mempermudah mobilisasi penduduk Kabupaten Empat Lawang tercatat sepanjang 1.013,59 km. 110,19 km diantaranya dalam kondisi rusak dan 113,49 km dalam kondisi rusak berat. Dan dilihat dari jenis permukaan jalan, 609,68 km permukaannya di aspal dan 373,49 km masih berupa kerikil, selebihnya 30,42 km berupa tanah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, kriteria pemerataan masih belum dapat dipenuhi.

5. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu. Responsivitas menunjukkan respon dari semua aktivitas, kriteria ini

melihat keberhasilan kebijakan pemekaran daerah melalui respon masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa respon masyarakat dari kebijakan pemekaran daerah ini mendapat tanggapan yang cukup baik karena dapat mengurangi beban biaya hidup mereka dalam hal ini kebutuhan pangan dan pelayanan. Pemekaran daerah dinilai dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Meskipun untuk menikmati fasilitas tersebut masyarakat harus tetap melewati jalan raya yang masih dianggap perlu perbaikan. Umumnya, kendaraan yang menggunakan jalan tersebut adalah kendaraan pribadi dan didominasi oleh pegawai yang ingin bekerja di ibukota kabupaten. Sementara fasilitas kendaran umum minim untuk didapatkan ditambah lagi dengan geografis jalan yang berada diperbukitan dan sangat jarang ditemukan penduduk yang berdiam membuat masyarakat kesulitan untuk mencapai fasilitas umum rumah sakit daerah yang satu-satunya berada di Kabupaten Empat Lawang.

Pembangunan lainnya yang diupayakan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat adalah penguasaan lahan perkebunan sawit yang bekerja sama dengan perusahaan swasta dengan kesepakatan bahwa pekerja yang dapat bekerja di perkebunan tersebut diprioritaskan untuk masyarakat yang berstatus sebagai orang asli daerah Kabupaten Empat Lawang belum berhasil menekan jumlah pengangguran yang ada, ditambah dengan gaji/upah yang hanya Rp.50.000 perhari dikurangi biaya makan. Dalam wawancara yang dilakukan kepada beberapa pekerja di perkebunan sawit mengatakan bahwa upah yang diterima oleh pekerja tidak sebanding dengan beratnya beban pekerjaan yang dilakukan, hampir 12 jam berada di perkebunan dengan jatah makan yang harus ditanggung sendiri, ditambah dengan biaya transportasi total bersih yang dibawa hanya berkisar Rp.30.000 perhari sampai saat ini belum ada balai pelatihan bagi masyarakat. Respon pemerintah untuk menangkap solusi dari permasalahan yang timbul belum mampu terpenuhi sebab kebijakan yang seharusnya dapat ditangani melalui program yang strategis belum dapat terlihat dampaknya.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan. Kriteria ketepatan menjelaskan apakah hasil (tujuan) benar-benar bernilai.

Pemekaran daerah dikatakan tepat apabila mampu menjadi solusi dalam menangani kesejahteraan masyarakat. Namun apabila kondisi yang timbul sebaliknya, maka dapat diindikasikan bahwa kebijakan pemekaran daerah gagal menjadi solusi untuk menangani permasalahan kesejahteraan daerah.

Pada sektor pendidikan program yang menjadi unggulan dalam pembangunan sektor pendidikan adalah wajib belajar sembilan tahun, program ini merupakan upaya untuk meningkatkan taraf minimum pendidikan dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat. Namun yang menjadi permasalahan adalah banyaknya masyarakat atau anak usia sekolah yang mengalami

putus sekolah. Pada tahun 2017, APS anak SD sebesar 99,5%, SMP sebesar 98,64% dan SMA sebesar 76,03%.

Dari penelitian yang dilakukan peneliti yang pada awalnya hanya memfokuskan pada penilai 3 sektor utama mengenai pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat juga menemukan bahwa Kabupaten Empat Lawang belum siap dicabut status sebagai daerah tertinggal hal ini dikarenakan permasalahan pembangunan yang masih banyak menimbulkan kendala, jika dibandingkan dengan kabupaten yang bersebelahan dengan Musi Rawas yang memiliki alokasi anggaran 1,6 miliar dan memiliki sumber pendapatan yang besar dengan status masih daerah tertinggal maka secara prinsip perwujudan kesejahteraan ekonomi Kabupaten Empat Lawang masih tertinggal.

IV. SIMPULAN

Kebijakan Pemekaran Daerah Kabupaten Empat Lawang belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan masih menunjukkan *trend* pembangunan yang lambat, sebagaimana tampak dari: 1) kriteria efektivitas berupa masih banyaknya penduduk yang putus sekolah, terbatasnya tenaga kesehatan, serta menurunnya laju pertumbuhan ekonomi tiga tahun terakhir dan menurunnya PDRB di tahun terakhir; 2) kriteria kecukupan belum mampu menunjukkan tingkat efektivitas dapat memuaskan kebutuhan masyarakat; 3) kriteria pemerataan berupa belum terjadinya pemerataan pada akses pendidikan; 4) kriteria responsivitas berupa masih kurangnya respon pemerintah dalam perbaikan jalan untuk mobilitas penduduk; 5) kriteria ketepatan berupa belum tepatnya pencabutan status daerah tertinggal Kabupaten Empat Lawang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang sudah mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan artikel ini.

VI. REFERENSI

Akbar, I. (2017). *Otonomi, pemekaran daerah dan masalah integrasi*. Retrieved from www.kompas.com/17/02/2000.

Badan Pusat Statistik. (n.d.). Retrieved November 22, 2020, from <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>

Bappenas. (2007). *Studi evaluasi pemekaran daerah: Membangun dan menciptakan kembali proyek tata pemerintahan terdesentralisasi*. 1–40.

BPKAD. (2018). *No Title*.

BPS. (2018). *Kabupaten Empat Lawang dalam angka 2018*. Retrieved from <https://empatlawangkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NDIyMWFkZGE2N2RlMzVkZjcwZTliZDE0&xzmn=aHR0cHM6Ly9l>

bXBhdGxhd2FuZ2thYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxOC8wOC8xNi80MjIxYWRkYTY3ZGUzNWRmNzBlOWJkMTQva2Fi dXBhdGVuLWVtcGF0LWxhd2FuZy1kYWxhbS1hb

BPS. (2020). Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang. Retrieved November 12, 2020, from <https://empatlawangkab.bps.go.id/>

Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: an integrated approach. In *BMC Public Health* (6th ed.). Retrieved from <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>

Hakim, A., Hamidi, W., & Tampubolon, D. (2016). Analisis dampak pemekaran daerah ditinjau dari aspek percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Studi pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 843–857.

Hamdi, M. (2002). *Bunga rampai pemerintahan*. Jakarta: Yasrif Watampone.

Hidayati, D. A. (2017). Evaluasi kebijakan pemekaran daerah Kabupaten Lampung Barat. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 8(1). Retrieved from <http://jurnal.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/439>

Husin, H. (2019). Evaluasi kebijakan pemekaran daerah di Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Sosio Sains*, 5(1), 23–32. Retrieved from <http://journal.ildikti9.id/sosiosains/article/view/18/126>

Kuwado, F. J. (2018). Kepada Wali Kota, Jokowi Isyaratkan Lanjutkan Moratorium Pemekaran Wilayah. Retrieved November 12, 2020, from <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/23/20034651/kepada-wali-kota-jokowi-isyaratkan-lanjutkan-moratorium-pemekaran-wilayah>

LKIP. (2018). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017*.

Naisaban, A., & Rahmah, M. (2020). Efektivitas pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pembangunan: studi deskriptif kualitatif di Kecamatan Insana Tengah Kabupaten timor tengah utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 57–68. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.913>

- Portal Informasi Indonesia. (2019). Indeks Pembangunan Manusia Terus Meningkatkan. Retrieved November 12, 2020, from <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/indeks-pembangunan-manusia-terus-meningkat>
- Ratnawati, T., Afadlal, & Nyimas, L. L. . (2009). Studi tentang pemekaran daerah: pemetaan problematika politik, ekonomi, dan sosial budaya di daerah-daerah pemekaran era reformasi : upaya menuju penyusunan konsep alternatif. Retrieved November 12, 2020, from LIPI Press website:
https://books.google.co.id/books/about/Studi_tentang_pemekaran_daerah.html?id=GOinYgEA CAAJ&redir_esc=y
- Waskitawati, D. (2018). Managing wastewater in decentralized indonesia: could local democracy improve public service? *CosmoGov*, 4(2), 213. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.16627>
- Wibawa, K. C. . (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. In *Online Administrative Law & Governance Journal* (Vol. 2).